



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

*** Correspondence:**
asunarya@pknstan.ac.id

DOI: [10.22219/janayu.v2i1.12570](https://doi.org/10.22219/janayu.v2i1.12570)

Sitasi:
Sulaeman, A.S. (2021). Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja dan Pelaporan Keuangan melalui Program Asistensi Dana Desa. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 2(1), 1- 12.

Proses Artikel

Diajukan:
18 Juni 2020

Direviu:
5 Agustus 2020

Direvisi:
6 Agustus 2020

Diterima:
8 Agustus 2020

Diterbitkan:
17 Februari 2021

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2721-0421
E-ISSN: 2721-0340

Tipe Artikel: Paper Pengabdian

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja dan Pelaporan Keuangan melalui Program Asistensi Dana Desa

Agus Sunarya Sulaeman^{1*}

Afiliasi:

¹Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRACT

Village Fund has been launched by the central government for five years. Various problems arise in its management. The problem of human resources of village financial managers becomes an important point, one of the effects is that the problem of shopping administration and financial reporting of villages becomes difficult. The assistance program is carried out to increase the human resources capacity of village financial administration and reporting. This program is carried out by combining classical approaches in the classroom, mentoring in the field and creating a community of village financial managers. Aspects of completeness of administration documents, quality of administration, completeness and quality of reporting are indicators of the success of this program. The results of this assistance program have an impact on increasing the human resources capacity of village financial managers. The basis is the improvement of quality in the indicators used in village financial administration and reporting.

KEYWORDS: Administration; Reporting; Village Financial Assistance; Village Funds.

ABSTRAK

Dana Desa sudah lima tahun diluncurkan pemerintah pusat. Berbagai masalah muncul di dalam pengelolaannya. Masalah sumber daya manusia pengelola keuangan desa menjadi poin penting, salah satu efeknya adalah masalah penatausahaan belanja dan pelaporan keuangan desa menjadi sulit. Program asistensi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Program ini dilakukan dengan pendekatan memadukan pendekatan klasikal di kelas, pendampingan di lapangan dan membuat komunitas pengelola keuangan desa. Aspek Kelengkapan dokumen penatausahaan, kualitas penatausahaan, kelengkapan dan kualitas pelaporan menjadi indikator keberhasilan program ini. Hasil program asistensi ini memberikan dampak pada peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan desa. Dasarnya adalah peningkatan kualitas pada indikator yang digunakan di dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

KATA KUNCI: Asistensi Keuangan Desa; Dana Desa; Penatausahaan; Pelaporan

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 akhir, program penyaluran dana desa dilaksanakan. Dana yang dikucurkan selama 5 tahun sudah melebihi angka Rp 250 triliun, dengan rata-rata per desa mendapatkan Rp 1 milyar per tahun. Angka dana desa ini cukup besar, apabila dibandingkan dengan anggaran yang dikelola oleh suatu kecamatan di pulau Jawa (Sulaeman dan Silvia 2019). Anggaran yang dikelola kecamatan hanya berkisar Rp 500 jutaan, padahal dalam satu kecamatan bisa jadi lebih dari lima desa (Mamelo, Kalangi, dan Lambey 2016).

Permasalahan pun muncul di dalam pengelolaan keuangan, tidak sedikit temuan audit dari inspektorat atas pengelolaan keuangan desa tersebut, baik karena tidak tertib administrasi, kelalaian, ketidakpahaman, maupun tindak kecurangan (Karyanto 2016). Bahkan ada temuan yang bersifat pidana sehingga ada beberapa kepala desa harus berurusan dengan pengadilan. Banyak yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, baik dari segi regulasi yang terus mengalami perbaikan-perbaikan, tatacara pemilihan kepala desa baik desa-desa yang kepala desanya dipilih langsung oleh warganya, maupun desa-desa yang kepala desanya ditetapkan menurut adat (Utara 2017)

Walaupun sudah memasuki tahun kelima pelaksanaan dana desa namun tingkat pemahaman dan akuntabilitas pelaksanaan dana desa ini masih menghadapi kendala. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidaktepatan akuntabilitas adalah masalah sumber daya manusia pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan di desa-desa, juga seiring dengan penggantian kepala desa yang seringnya diikuti penggantian hampir seluruh perangkat desanya. Dampaknya semua pengelolaan keuangan memulai dari baru kembali (Pahlevi 2015)

Beranjak dari permasalahan yang ada, bahwa pelatihan/*coaching* dan bimbingan terhadap pengelola keuangan desa masih tetap diperlukan. Kegiatan asistensi pelaksanaan belanja dan pelaporan bagi pengelolaan keuangan desa ini diawali dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang merupakan program Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan untuk para pengelola keuangan desa termasuk pengelola aset dan BUMDesa. Pada tahun 2019 selain diadakan Maluku, juga dilakukan di Aceh, Kalimantan Barat, dan Papua. Pada tahun sebelumnya telah dilakukan juga di Sulawesi Tengah, Sulaewsi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kegiatan asistensi di Maluku dilakukan terhadap desa percontohan yang pengelolanya sudah mengikuti pelatihan sebelumnya. Asistensi kepada pengelola keuangan dipilih lokasi di empat desa di dua Kabupaten, sesuai permohonan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Maluku dan Seram Bagian Barat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya pengelola keuangan desa khususnya di pelaksanaan belanja dan pelaporan, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Kegiatan ini bermanfaat untuk membantu tugas pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga untuk perangkat desa dalam rangka mendorong pengelolaan dana desa agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan ini merupakan kegiatan tim yang dalam kegiatannya mencakup tentang penganggaran, pengelolaan aset dan pengelolaan BUMDesa yang diasistensi oleh anggota tim lainnya, sementara penulis melakukan asistensi di bidang pelaksanaan belanja dan pelaporan keuangan.

METODE

3

Kegiatan Asistensi dalam pengabdian masyarakat ini tidak dilakukan sendiri, tetapi berkaitan dengan tahapan sebelumnya yang telah dilakukan, yaitu:

Tahap pelatihan

Tahap asistensi 1 *Coaching*, Implementasi mandiri, Pendampingan

Tahap asistensi 2 *Coaching*, Evaluasi, Penilaian

Tahap tindak lanjut "*Community of practice*"

Berikut ini penjelasan masing-masing tahapan

Tahap pelatihan

Pada tahap ini dilakukan pelatihan untuk pengelola keuangan yang terpilih mewakili desa dan daerahnya. Pelatihan ini sebagai awal dilakukannya asistensi, karena lokasi asistensi keuangan desa ditetapkan dengan melihat hasil pelatihan. Asistensi dilakukan sebagai bagian juga dari evaluasi hasil pelatihan. Tahap pelatihan ini dilaksanakan oleh Tim dari Pusdiklat KNPK BPPK Kementrian Keuangan.

Asistensi tahap I

Pada tahap ini dilakukan asistensi untuk desa terpilih sesuai rekomendasi dari Dinas Pembedayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Barat. Dari masing masing Kabupaten dipilih 2 desa dari 2 kecamatan. Pada tahap asistensi 1 ini, dilakukan pendampingan di lokasi dengan terlebih dahulu peserta asistensi untuk mempersiapkan dokumen-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan belanja, dan mencoba terlebih dahulu mempraktikkan apa yang seharusnya dilakukan di dalam pelaksanaan belanja.

Pada saat kunjungan peserta asistensi yaitu pelaku yang terkait dengan pelaksanaan belanja dikumpulkan dan dilakukan diskusi dan *coaching*.

- a. *Coaching* & monitoring
- b. Tahap Implementasi mandiri

peserta yang sudah mengikuti pelatihan diminta untuk mengimplementasikan di pelaksanaan dan pelaporan keuangan di desa masing-masing. jika mendapatkan kesulitan di dalam pelaksanaan bisa melakukan konsultasi dengan telpon/chat.

Asistensi tahap II

Pada asistensi tahap 2 ini lebih melihat perkembangan dan perbaikan yang dilakukan dari hasil asistensi tahap 1. Dalam waktu sekitar 2 bulan dari asistensi tahap 1, bagaimana implementasi dari hasil *coaching* tahap 1. Pada asistensi tahap 2 ini penekanannya lebih pada peningkatan kualitas dari pelaksanaan belanja dan pelaporan keuangan. Dalam asistensi tahap 2 ini dievaluasi juga bagaimana penatausahaan belanja dan pelaporan untuk tahun berjalan sampai dengan tanggal asistensi selesai, dan diberikan penilaian sehingga dari 4 desa yang diasistensi bisa dijadikan desa percontohan atau tidak.

Community of practice

Janayu

2.1

Terakhir pembuatan *community of practice* untuk semua perangkat desa dari 4 desa yang dilakukan asistensi, yaitu membuat komunitas para pengelola keuangan agar bisa bertukar pendapat,berbagi pengalaman dan berdiskusi termasuk dengan para pendamping

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Elpaputih (DEP) yang letaknya paling timur selatan Kabupaten Seram Bagian Barat, berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah merupakan satu dari 7 (tujuh) desa di wilayah Kecamatan Elpaputih. Sebagai ibukota Kecamatan Elpaputih, DEP memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Elpaputih, yakni 2.223 jiwa (data BPS Seram Bagian Barat). Saat DEP dikunjungi di asistensi tahap 1, desa tersebut belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hal ini terjadi karena belum adanya Kepala Desa definitif yang memimpin desa. Pejabat yang bertugas sebagai Kepala Desa saat ini adalah Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Di samping pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk baru satu bulan bertugas.

Dibandingkan dengan lima desa lainnya di Kecamatan Kairatu Barat, Desa Waihatu (DWT) merupakan desa dengan luas wilayah terkecil, yakni 13,56 km². Pada saat asistensi, tim asistensi bertemu dengan Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, termasuk juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). DWT ini merupakan desa penghasil beras dan sayur, desa pertanian yang ada di pulau Seram .

Desa Wakasihu (DWH) merupakan desa adat yang paling kecil wilayahnya di Kecamatan Leihitu Barat, dan berada di pesisir Laut Banda. Pada saat dilakukan asistensi, Kepala Desa (Raja Negeri) Wakasihu, baru saja dilantik satu bulan. Penunjukan dan penetapan Kepala Desa ini tidak dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa oleh para penduduk desa, melainkan melalui penetapan secara adat, karena DWH ini merupakan desa adat (Negeri Wakasihu). Kepala Desa yang saat ini bertugas merupakan adik dari Kepala Desa sebelumnya, dan pada saat asistensi, Kepala Desa yang baru sedang bertugas di tempat lain, sehingga tim asistensi ditemui oleh Kepala Desa sebelumnya, bersama perangkat desa.

Pada saat kunjungan asistensi, Desa (Negeri) Tengah-Tengah belum memiliki Kepala Desa yang definitif. Jabatan Kepala Desa dijabat oleh Pejabat Kepala Desa, yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten untuk masa kerja enam bulan. Pada saat asistensi, masa kerja enam bulan Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk juga telah berakhir, namun penunjukan Pejabat Kepala Desa berikutnya belum ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Kepala Desa di Negeri Tengah-Tengah) ini ditetapkan dari keturunan raja yang sejak dahulu berkuasa di Negeri Tengah-Tengah. Kepala Desa yang sebelumnya bertugas, meninggal dunia sebelum masa tugasnya berakhir.

Tahap pelatihan

Pada tahap ini pengelola keuangan yang terpilih mewakili diikutkan dalam Pemberian pelatihan terkait pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa yang meliputi materi tentang: pelaksanaan belanja desa, pengadaan barang/jasa desa, penatausahaan keuangan desa, perpajakan bendahara dan akuntansi keuangan desa. Pelatihan ini dilakukan sekitar 5 hari, dengan metode tatap muka dan simulasi materi terkait. Peserta merupakan perwakilan pengelola keuangan desa-desa yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Tahap pelatihan ini dilaksanakan oleh Tim dari Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK Kementerian Keuangan dilaksanakan di kota Ambon Maluku.

Asistensi tahap I

Pada Asistensi tahap 1 dilakukan *coaching* dengan melihat langsung apa yang mereka lakukan di masing-masing tempat

1. *Coaching* dan monitoring

Di dalam *coaching* dan monitoring saat asistensi tahap I dilakukan secara langsung di

desa-desa terkait. Ada pun yang dibahas dan dilihat adalah terkait: Kelengkapan dokumen (Rekening Kas Desa, Rincian Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, pembukuan meliputi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, buku Pembantu Panjar), Kualitas penatausahaan mencakup Identifikasi terhadap rekening pendapatan, Identifikasi terhadap rekening belanja, Ketepatan dalam pengisian Buku Kas Umum, Kecermatan dalam pengisian Buku Kas Umum, Ketepatan dalam pengisian Buku Pembantu, Kecermatan dalam pengisian Buku Pembantu, Ketepatan dalam penghitungan pajak. Kelengkapan dokumen pelaporan baik Laporan Pelaksanaan APBDes maupun Laporan Kekayaan Milik Desa, serta Kualitas Laporan yang meliputi laporan semesteran yang disampaikan pada bulan Juli, maupun penyampaian laporan tahunan yang tidak melebihi bulan Januari tahun berikutnya, serta Unsur-unsur yang dilaporkan lengkap dan dapat ditrasir (Mamelo *et al.* 2016).

a. Kelengkapan dokumen penatausahaan

Permasalahan yang ditemukan saat asistensi terkait kelengkapan dokumen penatausahaan, lebih banyak pada ketidak lengkapan pada pembuatan Buku Kas Uumum, dan buku pembantu. Alasannya nggak dibuat karena sudah dibukukan juga di dalam siskeudes. Pada desa EP ketidak lengkapan ini disebabkan karena kaur keuangannya baru serta kepala desanya belum ditetapkan yang baru. Selain karena dokumen lama masih dibawa oleh pejabat lama. Buku rekening bank, rincian anggaran biaya sudah ada. Dampaknya pencairan dana desa tahap I terlambat cair, dan baru cair sesaat menjelang asistensi tahap I. Dana Desa Dropping tahap 1 turun habis diambil untuk operasional yang sudah 7 bulan belum dibayar karena belum lengkapnya persyaratan pencairan dana. Dana sekitar 400 juta, dokumen pertanggungjawaban sudah dibuatkan, namun belum dibukukan dengan baik (Mondale, Aliamin, dan Fahlevi 2017).

Berbeda dengan desa WT terkait kelengkapan dokumen penatausahaan belanja. Dokumen –dokumen penatausahaan terkait buku rekening kas desa, rencana anggaran biaya, pembuatan SPP, pembuatan BKU, Buku pembantu Bank, Pajak dan Panjar semuanya sudah dibuat dengan baik. Belum terindikasi permasalahan secara khusus terkait keuangan karena keterbatasan waktu, namun jika dilihat sepintas petugas keuangan yang sudah mahir juga mengoperasikan siskeudes dan paham pembukuan dan penatausahaan sepertinya masalah yang sering terjadi adalah masalah koding BKU kaitannya dengan buku pembantu serta masalah perpajakan

Kelengkapan dokumen penatausahaan desa WH, dokumen–dokumen penatausahaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan lengkap baik buku kas umum, buku kas pembantu dan perhitungan pajak. Walaupun pembukuan sudah rapi dan pejabat menguasai, mengerti tentang pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, jika dilakukan tracing transaksi agak cukup lama jika orang lain memahami tanpa kehadiran ybs. Masalah lain yg muncul hanya sedikit masalah pembukuan panjar, jika dikaitkan dengan BKU. Juga masalah pajak, masih ada sedikit kekurangada sedikit kurang pahaman terkait aktivitas jasa yang dikenakan Pph 21 atau pph 23. Lebih diberikan pemahaman transaksi-transaksi yang berdampak pemotongan Pph 21 dan 23 (Indrianasari 2017). Pemahaman tentang PBJ desa perlu juga diketahui oleh pejabat keuangan desa

Desa TT Kelengkapan dokumen penatausahaan, Dokumen –dokumen penatausahaan saat dikunjungi belum tersedia akibat blokir rekening bank desa.

b. Kualitas penatausahaan

Pada desa EP kualitas penatausahaan belum memenuhi kriteria berkualitas baik. Pejabat baru belum melakukan penatausahaan secara keseluruhan, karena buku kas umum dan buku pembantu lainnya belum dilakukan. Berbeda dengan di desa WT, kemampuan petugas keuangan dalam identifikasi terhadap rekening pendapatan, rekening belanja, ketepatan pengisian BKU, kecermatan dan ketepatan pengisian buku pembantu sudah menandakan kualitas yang bagus. Namun ketepatan dalam perhitungan pajak perlu dicek kembali apakah sudah sesuai atau masih terdapat salah pungut/salah potong. Pejabat keuangan cukup cekatan mengerjakan pembukuan penatausahaan. Kualitas penyajian, pencatatan dan penatausahaan keuangan, termasuk kemampuan mengoperasikan siskeudes sudah baik.

Kualitas penatausahaan di desa WH, pejabat keuangan sangat menguasai pengelolaan keuangan dan aplikasi siskeudes. Background Pejabat keuangan sesuai dengan bidang keuangan, karena ybs lulusan SMK Akuntansi. Cukup cekatan mengerjakan pembukuan dan penatausahaan pertanggungjawaban. Bukti bukti pertanggungjawaban disusun rapi dan dikluster sesuai sumber dana, apakah dana desa, alokasi dana desa atau sumber lainnya. Identifikasi rekening penerimaan dan rekening belanja tersistematika dengan baik.

Kualitas penatausahaan desa TT, akibat blokir rekening bank dampaknya penatausahaan belum dilakukan. Kualitas dari penatausahaan menjadi dipertanyakan saat kunjungan. Masalah berkualitas belum bisa dinilai, karena buku kas umum dan buku pembantu lainnya belum dilakukan. Konflik ketiadaan kepala desa dan pemblokiran rekening desa menjadi penghambat utama pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan DTT.

c. Kelengkapan dokumen pelaporan

Kelengkapan dokumen pelaporan, masih belum lengkap. Pejabat keuangan yang baru tidak begitu lancar dan paham siskeudes, semua diserahkan ke operator. Jadi persoalan utama keuangan Desa EP lebih masalah SDM yg masih baru dan juga kekosongan kepala desa. Di desa WT dokumen pelaksanaan APBDes dan laporan kekayaan desa sudah bisa disajikan dengan baik dari data terlapor. Begitu pun di desa WH kelengkapan dokumen pelaporan, laporan keuangan tahun sebelumnya dan semester 1 tahun berjalan sudah lengkap. Sementara itu, desa TT kelengkapan dokumen pelaporan, masih belum lengkap

d. Kualitas laporan

Kualitas laporan untuk DTT belum bisa dinyatakan berkualitas, karena penatausahaannya belum selesai dibuat dan laporan semesteranpun belum dibuat, sementara laporan tahunan sebelumnya sedang dibawa pejabat lama.. Pejabat keuangan baru belum bisa mentracing transaksi sebelumnya, dan memang dana desanya belum cair saat asistensi tahap I. Di buku bank hanya diserahkan bersaldo 2 jutaan, penggunaan silpa pejabat baru tidak bisa menjelaskan. Catatan Pembukuan kas umum dan buku pembantu masih belum begitu dipahami.

Berbeda dengan desa WT, kualitas laporan keuangan desa sudah cukup baik,

walaupun masih terjadi kelambatan dalam penyusunan laporan semester pertama untuk tahun 2019. Jika dilihat dari pertanyaan tentang tracing terhadap laporan keuangan dibandingkan transaksi, bisa disampaikan bahwa transaksi telah dicatat dan dilaporkan dengan baik. Laporan semesteran masih terlambat disampaikan. Kesibukan para perangkat desa WT yang sebagian besar adalah petani seperti juga masyarakat, membuat pertemuan desa lebih banyak dilakukan malam hari.

Lain lagi dengan desa WH kualitas laporan sudah baik. Laporan keuangan bisa dtracir ke transaksi walaupun tidak mudah jika orang yang melakukan pembukuan tidak ada. Namun demikian laporan keuangan sudah bisa menggambarkan realisasi anggaran dan posisi kekayaan desa, dan disampaikan tepat waktu. Kualitas laporan Desa TT, belum berkualitas karena sampai saat asistensi tahap I belum ada indikasi dibuat, mengingat dana desa pun belum cair.

Berikut ini hasil *coaching* dan monitoring ini berupa ceklist pekerjaan perbaikan, pelengkapan, dan pengembangan serta percepatan penyelesaian terhadap hal-hal yang belum dituntaskan untuk keempat desa tempat dilakukan asistensi.

Desa	ref	Monev tahap I
DEP	1	Pembukuan harus segera dilakukan, walaupun baru terjadi penggantian kaur keuangan, catatan buku sebelumnya masih dibawa sama pegawai lama
	2	Kualitas penatausahaan perlu ditingkatkan, walau kaur keuangan baru baru belajar dan sebelumnya malah ikut pelatihan penganggaran
	3	Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penatausahaan, segera dilengkapi
	4	Laporan keuangan keuangan segera dilengkapi baik laporan tahunan maupun laporan semesteran yang berjalan
DWT	1	Pembukuan sudah lengkap dibuat, namun Penatausahaan supaya dilakukan lebih baik khususnya terkait perpajakan
	2	Penyusunan laporan pelaksanaan APBdes agar tidak terlambat disampaikan
	3	Laporan kekayaan milik desa tidak terlambat disampaikan
DWH	1	Pembukuan lengkap sudah dibuat, namun perlu belajar koding buku dan SPJ untuk memudahkan tracing transaksi
	2	Masalah administrasi panjar agar ditatausahakan di BKU juga dengan baik
	3	Pemahaman tentang aktivitas jasa yang dipotong/dipungut pajak tidak tertukar
	4	Laporan sudah dibuat dengan lengkap dan tepat waktu
DTT	1	Pemblokiran rekening dana desa bisa diselesaikan sesegera mungkin
	2	Kelengkapan dokumen dilengkapi supaya blokir bisa dibuka
	3	Laporan pelaksanaan APBDes segera diselesaikan

Tabel 1.
Monev Tahap I

2. Implementasi mandiri

Setelah diberikan *coaching* dan diskusi serta klarifikasi tentang apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, para pengelola keuangan khususnya yang melakukan penatausahaan belanja untuk mempraktikkan, memperbaiki, melengkapi dan mempercepat penyelesaian pelaporan untuk desa yang belum selesai.

Dari empat desa yang diasistensini ini dua desa masih bergelut dengan penatausahaan dan pelaporan yang belum selesai sehingga pencairan dana desa tahap II belum bisa cair. Implementasi mandiri ini dilakukan sekitar 2,5 bulan, sampai kunjungan berikutnya pada asistensi tahap II. Selama implementasi mandiri ini perangkat desa dibuatkan grup whatsApp sebagai sarana komunikasi, jika terdapat kendala-kendala yang masih ditemukan. Hasil implementasi mandiri inilah yang akan dicek secara fisik pada saat asistensi tahap II.

Dari asistensi tahap I ini, ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pengelola keuangan desa khususnya pelaksanaan belanja dan pelaporan belum tertuntaskan dan lengkap.

- a. SDM pengelola keuangan, masalah SDM ini masih tantangan yang berat mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Termasuk juga kekosongan kepala desa selaku pejabat sentral di desa ikut mempengaruhi kelancaran pengelolaan keuangan desa (Karyanto 2016)(Juliana and Widhianningrum 2017).
- b. Kendala waktu koordinasi dengan masyarakat dan pembina desa. Bagi perangkat desa untuk melakukan koordinasi dengan pembina desa di kabupaten secara geografis memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti desa WH yang ada di ujung barang pulau Ambon utara, ternyata masuk wilayah kabupaten Maluku Tengah yang beribukota di Masohi pulau Seram. Butuh kendaraan ke pelabuhan di ujung timur pulau Ambon, menyeberang dengan kapal Speedboot yang sehari hanya dua kali, atau naik kapal ferry ke Seram Barat dan jauh juga ke Masohinya (Abidin 2015).
- c. Jarak dan sarana koordinasi ke pusat kota. Seperti disampaikan sebelumnya karena jarak dan waktu maka pencairan dana pun saat cair diambil sekaligus, sehingga saldo di rekning bisa saja tinggal satu atau dua juta.
- d. Dokumentasi dan peraturan masih sulit dipahami(Mondale et al. 2017). Bagi sebagian besar perangkat desa masih sulit memahami ketentuan dokumentasi dan peraturan yang ada terkait dengan desa (Diansari 2015). Salah satunya masalah perpajakan. Walaupun mereka seringkali konsultasi ke KPP, yang secara lokasi cukup jauh dan kesulitan komunikasi jika lewat telpon.

Asistensi Tahap II

Pada asistensi tahap 2 ini dilakukan monitoring/evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan pada asistensi tahap I , kemudian dilanjutkan dengan penilaian

1. Monitoring/evaluasi

Pada saat asistensi tahap II, dilakukan pembahasan dengan penanggungjawab keuangan yang pada asistensi tahap I bertemu. Kebetulan tidak ada penggantian personil untuk pengelola keuangan, hanya kepala desa (kepala negeri) yang tadinya belum ditetapkan, sekarang sudah definitif sehingga aktivitas desa menjadi lebih dinamis. Hasil monitoring terhadap permasalahan yang terjadi dan ditemukan pada

asistensi tahap I bisa disampaikan sebagai berikut:

9

Desa	No	Monev asistensi I	Monev asistensi II
DEP	1	Pembukuan harus segera dilakukan, walaupun baru terjadi penggantian kaur keuangan, catatan buku sebelumnya masih dibawa sama pegawai lama,	Pembukuan telah dilakukan, baik BKU maupun buku pembantu (kecuali buku panjar). Namun pembukuan perpajakan di BKU masih kurang lengkap
	2	Kualitas penatausahaan perlu ditingkatkan, walau kaur keuangan baru belajar dan sebelumnya malah ikut pelatihan penganggaran	Penatusahaan sudah meningkat, kaur keuangan banyak belajar tentang penatausahaan, tetap mengandalkan operator siskeudes. Pot/put pajak masih terdapat kekurangtepatan
	3	Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penatausahaan, segera dilengkapi	kelengkapan dokumen sudah dilengkapi sesuai dana yang sudah cair, walaupun masih terlambat pelaporannya
	4	Laporan keuangan keuangan segera dilengkapi baik laporan tahunan maupun laporan semesteran yang berjalan	laporan keuangan desa semester 1 sudah dibuat, dan laporan tahunan untuk tahun berjalan tidak akan telat
DWT	1	Pembukuan sudah lengkap dibuat, namun Penantausahaan supaya dilakukan lebih baik khususnya terkait perpajakan	Masih terdapat kekurang tepatan pot/put pajak baik terkait pph 22, 23, pph 4 ayat 2 dan PPN. Hasil potong/pungut dan setor belum terekam di BKU
	2	Penyusunan laporan pelaksanaan APBdes agar tidak terlambat disampaikan	Laporan semester terlambat juga baru Oktober tersampaikan,
	3	Laporan kekayaan milik desa tidak terlambat disampaikan	Masih ada saldo kas bendahara dan silpa yang belum link LKMD
DWH	1	Pembukuan lengkap sudah dibuat, namun perlu belajar koding buku dan SPJ untuk memudahkan tracing transaksi	Lebih rapi dalam pembukuan, tracing transaksi mudah diidentifikasi
	2	Masalah administrasi panjar agar ditatausahakan di BKU juga dengan baik	Buku panjar masih belum dibuat karena arahan semua desa tetap tidak dibuat
	3	Pemahaman tentang aktivitas jasa yang dipotong/dipungut pajak tidak tertukar	Sudah melakukan konsultasi ke KPP maluku
	4	Laporan sudah dibuat dengan lengkap dan tepat waktu	Masih dipertahankan
DTT	1	Pemblokiran rekening dana desa bisa diselesaikan sesegera mungkin	Pemblokiran sudah bisa dibuka sehingga transfer dana desa bisa dilakukan
	2	Kelengkapan dokumen dilengkapi supaya blokir bisa dibuka	kelengkapan dokumen sudah dipenuhi, termasuk pot/put perpajakan walau belum disetor pada awal desember
	3	Laporan pelaksanaan APBDes segera diselesaikan	Walau terlambat laporan pelaksanaan sudah dibuat

Tabel 2.
Monev
Tahap
II

Keempat desa yang diasistensi menunjukkan keseriusan dan kemajuan luar biasa, walaupun masih terdapat hambatan-hambatan. Dari penatausahaan semuanya desa ini yang tadinya ada desa belum melengkapi/membuat sekarang sudah semua desa sudah menyelesaikannya yang membedakan di sisi kualitas nya saja (Wida, Supatmoko, and Kurrohman 2017).

2. Penilaian

Isu penilaian menjadi hal yang menyemangati desa-desa tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian kelengkapan penatausahaan dan pelaporan. Desa yang mendapat nilai terbaik akan diundang ke Jakarta dan bisa saja menjadi desa percontohan. Tentunya selain masalah isu penilaian, juga masalah pencairan Dana Desa juga yang tidak akan cair jika pelaporan belum lengkap disampaikan, padahal untuk lengkapi pelaporan harus diselesaikan juga dokumen penatausahaan belanjanya (Marvanti dan Praptoyo 2017).

Hasil penilaian terhadap implementasi mandiri dengan sebelumnya dilakukan klarifikasi dan diskusi diperoleh gambaran bahwa desa WH memiliki nilai tertinggi diikuti desa WT, desa EP dan desa TT. Penilaian dilakukan terhadap:

- Kelengkapan dokumen (30 poin)
- Kualitas penatausahaan (20 poin)
- Kelengkapan pelaporan (30 poin)
- Kualitas pelaporan (20 poin)

Dari hasil penilaian untuk pelaksanaan Belanja dan pelaporan keuangan, terlihat DWH paling tinggi. Penilaian ini hanya salah satu unsur yang dilakukan untuk sisi pengelolaan belanja dan pertanggungjawaban serta pelaporan. Penilaian ini dilakukan juga sebagai bentuk mencari desa percontohan, namun ada penilaian untuk unsur-unsur lainnya selain unsur pelaksanaan belanja dan pelaporan keuangan desa.

Hasil positif asistensi tahap II ini memberikan suatu input/mendorong para pengelola keuangan desa untuk lebih cepat dan tergerak menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi desanya di dalam mengelola keuangan desa. Semua desa yang diasistensi pada tahap II telah selesai semuanya melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan. Bahkan desa WH dan desa WT sudah tinggal menunggu pencairan dana desa tahap III, sementara desa TT baru cair kan dana desa tahap II dan lagi mengajukan untuk dana desa tahap III. Sementara itu desa EP sedang proses pengajuan dana desa Tahap III. Bisa disampaikan bahwa program asistensi desa ini bisa meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan belanja dan pelaporan desa. Hal lain yang mungkin ikut mempengaruhi peningkatan kualitas pelaksanaan belanja dan pelaporan keuangan desa ini adalah sudah definitifnya para kepala desa/kepala nagari pada keempat desa terpilih untuk asistensi dana desa.

Community of practise

Setelah selesai asistensi tahap II, untuk mempertahankan pendampingan berkelanjutan maka perlu dibuat suatu wadah untuk *sharing experience*, diskusi dan solusi berkelanjutan. CoP merupakan wadah perangkat desa/pengelola keuangan dan aset, operator siskeudes, tim pendamping dan pembina daerah untuk meneruskan komunikasi, diskusi dan mencari solusi. Wadah komunitas ini masih tetap berlanjut sampai sekarang.

SIMPULAN

11

Kegiatan pengmas ini setidaknya ikut mengembangkan peningkatan kapasitas SDM di dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di dalam pelaksanaan belanja dan pelaporan. Masalah SDM pengelola keuangan masih jadi kendala untuk desa-desa lebih khusus lagi buat desa-desa *remote area*, ditambah juga dokumen-dokumen penatausahaan yang bagi orang desa masih terlalu kompleks. Dengan program pengabdian masyarakat dengan metode asistensi secara bertahap ini ada kemajuan yang cukup signifikan di dalam pengelolaan belanja desa. Penatausahaan belanja desa, dan pelaporan keuangan desa menjadi lebih lengkap, pemahaman lebih baik dalam implementasinya dan pelaporan lebih akurat dan cepat.

Bahwa masih ada faktor lain yang *uncontrollable* bagi sebuah desa seperti berlarutnya penetapan kepala desa yang berdampak pada lambatnya tahapan pengeolaan keuangan berproses. Di samping itu, jarak dan sarana untuk korrordinasi ke pusat kota menjadi kendala tersendiri. Masalah koordinasi dan pemahaman dengan level pembina desa juga masih sering terjadi sehingga menambah jenjang masalah menjadi lebih lebar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6(1):61–76.
- Diansari, Rani Eka. 2015. "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013." *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* 1–11:412–18.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak* 1(2):29–46.
- Juliana, Pipit, dan Purweni Widhianningrum. 2017. "Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 6(2):169.
- Karyanto, Rudy. 2016. "Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteris-Tik Kepala Desa?" *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 16(2):149.
- Mamelo, Gresly Yunius Rainal, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. 2016. "Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 7(2):148–59.
- Marvanti, Iga Vidya, dan Sugeng Praptoyo. 2017. "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6(2):546–62.
- Mondale, Teuku Fitrawan, Aliamin Aliamin, dan Heru Fahlevi. 2017. "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(2):196–212.
- Pahlevi, Indra. 2015. "Dana Desa Dan Permasalahannya." *Info Singkat Pemeintah Dalam Negeri* 7(17):1–4.
- Sulaeman, Agus Sunarya, dan Vivin Silvia. 2019. "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.

Utara, Kabupaten Minahasa. 2017. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Eksekutif* 1(1).

Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4(2):148.

Laporan BPS Kabupaten Maluku Tengah 2018

Laporan BPS Kabupaten Seram Bagian Barat 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa”